

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abut, Hilarus, 2007, Buku 1 Perpajakan, penerbit Diadit Media, Jakarta.

Arba, H.M., 2015, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

Harsono, Boedi, 2013, Hukum Agraria Indonesia, penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.

Ismaya, Samun, 2011, Pengantar Hukum Agraria, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Keumala, Dinda dan Setiyono, 2009, Tip Hukum Praktis Tanah dan Bangunan, penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta.

Mansur, Muhammad dan Teguh Hadi Wardoyo, 2006, Pajak Terapan Brevet A & B, Buku II Pemahaman Terapan Dalam Kerangka Hukum Pajak, Penerbit, Taxsys, Jakarta.

Mulyawan, Iwan, 2010, Panduan Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 (PDRD), Mitra Wacana Media, Jakarta.

Nawawi, Hadari, 1996, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Pangestu, Leo Agung Danang Dwi, 2017, Perpajakan Brevet A & B, penerbit CAPS (Center for Academic Publishing Service), Yogyakarta.

Perangin, Effendi, 1991, Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

_____, 1994, Hukum Agraria di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Publishing, 2010, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Hak-Hak Atas Tanah, penerbit Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.

Sahnan, 2018, Hukum Agraria Indonesia, penerbit Setara Press, Malang.

Salim, H.S., 2016, Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2017, Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua), Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Santoso, Urip, 2005, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, Prenada Media, Jakarta.

_____, 2013, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Prenada Media, Jakarta.

Siahaan, Marihot Pahala, 2003, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Teori dan Praktek, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sihombing, Irene Eka, 2017, Segi-Segi Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Universitas Trisakti, Jakarta

Sitorus, Oloan dan HM Zaki Sierrad, 2006, Hukum Agraria di Indonesia Konsep Dasar dan Implementasi, penerbit Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2011, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemitro, Roni Hanitjo, 1982, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.

_____, 1990, Metodologi Penelitian dan Jurumetri Hukum, Ghalia, Jakarta.

_____, 1998, Metodologi Penelitian dan Jurumetri Hukum, Ghalia, Jakarta.

Soetrisno, Hadi, 1985, Metodologi Research Jilid II, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

Suardi, 2005, Hukum Agraria, Badan Penerbit Iblam, Jakarta.

Sulhan, Irwansyah Lubis dan Anhar Syahnel, 2018, Buku 1 Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum), Mitra Wacana Media, Jakarta.

Susanti, Dyah Ochterina dan A'an Effendi, 2018, Penelitian Hukum (*Legal Research*), Sinar Grafika, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 1991, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.

Zumrokhatun dan Dandi Syahrizal, 2014, Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya, penerbit Dunia Cerdas, Jakarta.

B. Jurnal

Mokoagow, Areini Airin, 2017, Proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Jual Beli Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Prawira, I Gusti Bagus Yoga, 2016, Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli, Magister Kenotariatan Universitas Mataram, Mataram.

Rosandi, Baiq Henni Paramita, 2016, Akibat Hukum Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Belum Didaftarkan, Magister Kenotariatan Universitas Mataram, Mataram.

Sihite, Clara Helmy, Analiss Kasus Atas Jual Beli Tanah Warisan (Srudi Kasus Putusan MA Nomor 680 K/PDT/2009) Antara Aston Purba Dkk Melawan Patar Simamora dan Gomar Purba.

Sofiana, Anita, 2017, Akibat Hukum Pengalihan Hak Jual Beli Melalui Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Tanah Warisan Tanpa Perserujuan Salah Satu Ahli Waris Lainnya, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unissula, Semarang.

WP, Dwi Sertio Nugraheni Pangastuti, Pelanggaran Jabatan (PPAT) Dalam Hal Pembuatan Akta Tanah (PPAT) Terhadap Akta PPAT (Studi Kasus Putusan No.03/Pdt.G/2015/PN.BH), Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Hukum Agraria.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Pajak.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tarif Baru Pajak Penghasilan (PPh) Final atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pelaporan dan Pemberitahuan Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat.

Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000 tentang Penentuan Besarnya Nilai Obyek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 517/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87/KMK.03/2002 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-21/PJ/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Bentuk serta Fungsi Surat Setoran BPHTB (SSB).

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-22/PJ/1997 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-24/PJ/2000 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar (SKP-LB) dan Perhitungan Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2011 tentang Prosedur Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 193 Tahun 2016 tentang Pembebasan 100% (Seratus Persen) atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Karena Jual Beli atau Pemberian Hak Baru Pertama Kali dan/atau Pengenaan Sebesar 0% (Nol Persen) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Karena Peristiwa Waris atau Hibah Wasiat Dengan Nilai Jual Obyek Pajak Sampai Dengan Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 126 Tahun 2017 tentang Pengenaan 0% (Nol Persen) atas Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan Terhadap Perolehan Hak Pertama Kali Dengan Nilai Obyek Pajak Sampai Dengan Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 117 Tahun 2019 tentang Penyetoran Bea Perolehan Hak atas Tanah atas Perjanjian Pendahuluan Jual Beli.

D. Makalah, Artikel dan Internet

Dwiwanto, Dodiek, Apa Sih yang Dimaksud dengan Akta Jual Beli (AJB), Jumat, 05 Oktober 2018, <http://artikel.rumah123.com>.

Kezia, Maria, 2018, Tanggung Jawab Akibat Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Kuasa Mutlak, Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Kuswanto, Heru, Hukum Agraria, Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya.

Linda, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pelaksanaan Jual Beli Tanah dan Bangunan Dikaitkan Dengan Kewajiban Pembayaran BPHTB dan PPh, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.

Penelitian deskriptif, <http://id.m.wikipedia.org>.

Prihandini, 2008, Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berkaitan Dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Putra, Aldi Sanjaya, 2017, Kekuatan Akta Kuasa Menjual Dalam Proses Balik Nama Hak Atas Tanah (Analisis Putusan Nomor : 211/Pdt.G/2014/PN.SLM Jo.No.9/PDT/2016/PT YYK), Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Sukandar, Dadang. Langkah dan Syarat Membuat AJB Tanah, Kompas.com, 08 Juli 2013, <http://properti.kompas.com/CatatLangkahdanSyaratMembuatAJBTanah>.

Wardani, Dewasari M., Tips Mengurus Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan, Rabu, 01 April 2015, konsultasi-hukum-online.com/www.legalakses.com.

